



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2020-2021
28-30 Januari 2021**

*

**

**

*

JAKARTA 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2020-2021
28-30 Januari 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Barat Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 3 Januari 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 12 Januari 2021.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Barat Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Barat Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 adalah untuk:

1. Melihat secara langsung dampak banjir dan longsor yang terjadi di kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 19 Januari 2021; serta
2. Mendengarkan informasi secara langsung dari para pemangku kepentingan di lapangan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian permasalahan dalam pencegahan dan penanggulangan banjir dan longsor; khususnya di kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Barat Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 dipimpin oleh H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI), dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Barat Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 28-30 Januari 2021 di lokasi terdampak banjir dan longsor yang terjadi di kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

B. GAMBARAN UMUM

Sejumlah bencana lingkungan telah melanda sejumlah wilayah negeri ini, awal tahun 2021. Satu di antaranya adalah banjir dan longsor yang menerjang Kawasan Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Alam semesta sebenarnya mempunyai kemampuan diri untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya sesuai dengan kodrat alamnya. Namun, tekanan eksploitasi manusia terhadap bumi telah melebihi dari daya dukung alam semesta kita. Lihat saja, lingkungan alami berubah total dan dibangun menjadi perumahan. Jumlah waduk penampung air yang tadinya banyak, sekarang berkurang, dan sebagian dalam kondisi rusak.

Perubahan iklim global semakin memperparah karena telah mengakibatkan kenaikan curah hujan, muka air laut jadi tinggi saat pasang. Sungai-sungai juga telah mengalami penyempitan, terdesak pemukiman, dan tersumbat oleh sampah. Ini yang kemudian menyebabkan tidak lancarnya laju air daratan kembali ke laut, belum lagi terhambat karena terjadi penurunan muka tanah tiap tahunnya.

Permukaan tanah dan hutan yang mampu berfungsi sebagai instalasi air raksasa bumi telah dirusak oleh manusia sendiri. Siklus air yang sudah tidak normal lagi dan sangat fluktuatif mengakibatkan ketersediaan air menjadi tidak sesuai kebutuhan lingkungan dan kehidupan yang bermartabat.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan juga masih kurang. Kegiatan reboisasi kurang digalakkan. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai masih kerap dijumpai. Akibatnya, luapan air bah dari sungai bukan hanya membawa air, namun juga sampah. Alhasil, semua itu menjadikan adanya bencana lingkungan dan kemanusiaan yang akan selalu berulang.

Bila dicermati, banjir dan longsor disebabkan berbagai persoalan lingkungan dan kita turut andil dalam persoalan lingkungan itu. Pembangunan kerap dirancang tanpa berpijak kodrat alam semesta. Air yang seharusnya jadi sumber kehidupan malah jadi petaka.

Sejak tahun 1970-an degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa lahan gundul tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam, baik yang digunakan

untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan, sebenarnya telah memperoleh perhatian Pemerintah Indonesia. Namun proses degradasi tersebut terus berlanjut, karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS.

DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

DAS merupakan ekosistem yang merupakan tempat unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia yang berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan *inflow* dan *outflow* dari material dan energi. Ekosistem DAS terdiri dari beberapa komponen, yaitu: manusia, hewan, vegetasi, tanah, iklim, dan air. Masing-masing komponen tersebut memiliki sifat yang khas dan keberadaannya tidak berdiri sendiri, namun berhubungan dengan komponen lainnya membentuk kesatuan sistem ekologis (ekosistem). Apabila fungsi dari suatu DAS terganggu, maka sistem hidrologi akan terganggu, penangkapan curah hujan, resapan, dan penyimpanan airnya sangat berkurang, atau memiliki aliran permukaan (*run off*) yang tinggi. Vegetasi penutup dan tipe penggunaan lahan akan kuat mempengaruhi aliran sungai, sehingga adanya perubahan penggunaan lahan akan berdampak pada aliran sungai.

Fungsi utama DAS adalah sebagai hidrologis, dimana fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang diterima, geologi, dan bentuk lahan. Fungsi hidrologis yang dimaksud termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, menyangga kejadian puncak hujan, melepaskan air secara bertahap, memelihara kualitas air, serta mengurangi pembuangan massa

(seperti terhadap longsor). Berdasarkan fungsinya, DAS dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. DAS Bagian Hulu

DAS bagian hulu dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. DAS bagian hulu dicirikan sebagai daerah dengan lanskap pegunungan dengan variasi topografi, mempunyai curah hujan yang tinggi dan sebagai daerah konservasi untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi. DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen sistem aliran airnya.

2. DAS Bagian Tengah

DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau.

3. DAS Bagian Hilir

DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. Bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan yang relatif landai dengan curah hujan yang lebih rendah.

Pengelolaan DAS adalah suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan, dimana daerah bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi. Perubahan penggunaan dan peruntukan lahan di daerah hulu akan

memberikan dampak di daerah hilir dalam bentuk fluktuasi debit air, kualitas air dan transport sedimen serta bahan-bahan terlarut di dalamnya.

Pengelolaan DAS tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral saja, melainkan perlu adanya keterkaitan antar sektor yang mewakili masing-masing sub DAS, dari sub DAS hulu hingga ke hilir. Sungai sebagai bagian dari wilayah DAS merupakan sumber daya yang mengalir (*flowing resources*), dimana pemanfaatan di daerah hulu akan mengurangi manfaat di hilirnya. Sebaliknya perbaikan di daerah hulu manfaatnya akan diterima di hilirnya. Sehingga diperlukan suatu pengelolaan DAS secara terpadu yang melibatkan semua sektor terkait, seluruh stakeholder dan daerah yang ada dalam lingkup wilayah DAS dari hulu hingga ke hilir.

C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Banjir bandang yang melanda kawasan Gunung Mas, di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 19 Januari 2021 terjadi setelah turunnya hujan dengan intensitas 50 sampai 100 milimeter per hari mengguyur daerah ini. Hingga saat ini, kawasan yang berada di Sub DAS Cisampay yang terletak di bagian dari hulu DAS Ciliwung masih rawan banjir bandang dan longsor, sehingga upaya mitigasi bencana di daerah itu harus diperkuat.

Berdasarkan kajian Badan Informasi Geospasial (BIG), wilayah Gunung Mas Bogor, secara alami berada pada wilayah *outlet* (keluaran) berupa buangan material dan air dari daerah hulu di atasnya, sehingga dari sisi ekosistem di wilayah ini berpotensi kembali terjadi banjir bandang di kemudian hari. Area perbukitan di bagian atas Kampung Gunung Mas merupakan wilayah tangkapan hujan yang bentuknya seperti cekungan mangkok. Hujan yang tertangkap pada cekungan itu mengalir melalui titik keluaran air yang melewati Kampung Gunung Mas.

Wilayah hulu kampung ini merupakan sumber material dan air yang mengalir ke bawah berada pada kelerengan terjal hingga sangat terjal (>45% hingga >60%) sehingga gaya gravitasi berpotensi membawa material jatuh ke bawah dan menimbulkan kerusakan.

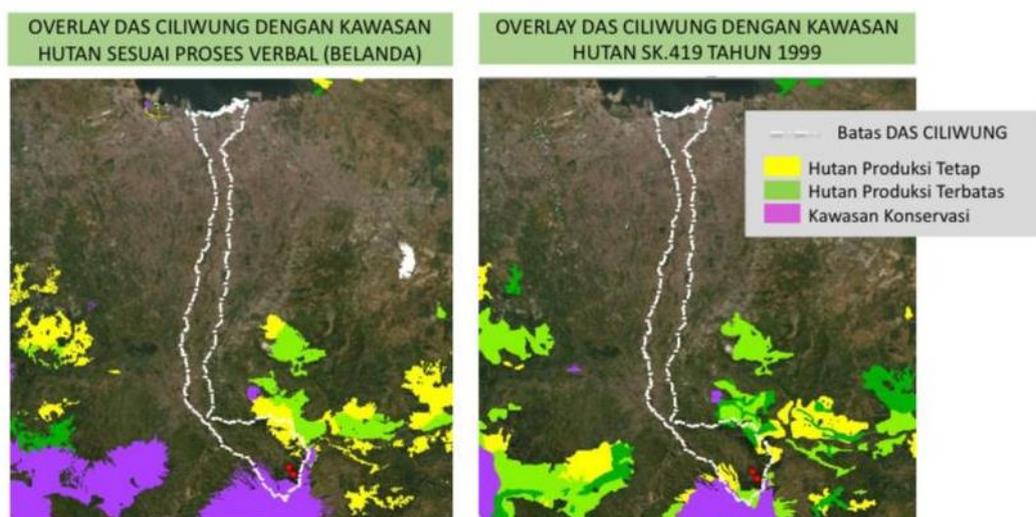
Selain pola aliran dan kemiringan lereng, faktor morfometri DAS lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap kejadian banjir bandang di Gunung Mas adalah bentuk Sub DAS Cisampay yang radial (bulat).

2. Lokasi kunjungan adalah pemukiman warga di Kampung Blok C, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang merupakan pemukiman terdampak bencana banjir dan longsor di Wilayah Gunung Mas yang terjadi pada tanggal 19 Januari 2021.

3. Gambaran Umum DAS Ciliwung

a. DAS Ciliwung merupakan DAS lintas provinsi mengalir di dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dan wilayah Provinsi DKI Jakarta. Secara Astronomis terletak diantara 1060 47' 43" – 1070 0' 15" BT dan 60 6' 12" – 60 34' 56" LS dengan luas 38.610,25 Ha.

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.79/MenLhk/Setjen/OTL.0/9/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 P.10/MenLhk/Setjen/OTL/0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, DAS Ciliwung termasuk wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung.



KAWASAN HUTAN DAS CILIWUNG

Berdasarkan Peta Penunjukkan Provinsi

Fungsi Kawasan	Luas (ha)		Total Luas (ha)
	Jawa Barat (195/Kpts-II/2003)	DKI Jakarta (220/Kpts-II/2000)	
Areal Penggunaan Lain (APL)	27.407	11.433	38.840
Hutan Produksi Tetap (HP)	952		952
Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	2.352		2.352
Total Luas (ha)	30.711	11.433	42.144



Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan s/d Tahun 2017*

Fungsi Kawasan	Luas (ha)
Areal Penggunaan Lain	38.054
HP Gunung Hambalang Barat	2.014
HPT Gunung Hambalang Timur	9
CA Telaga Warna	113
TN Gunung Gede Pangrango	1.950
TWA Telaga Warna	5
Total Luas (ha)	42.144

- 90% DAS Ciliwung merupakan APL sejak Proses Verbal (Belanda).
- Tidak terjadi pelepasan kawasan hutan pada DAS Ciliwung hingga sekarang.

Sub DAS Ciliwung Hulu



*SK. B099/MENLHK-PTL/KUH/PLA.2/11/2018 (Jawa Barat) dan SK. B099/MENLHK-PTL/KUH/PLA.2/11/2018 (DKI Jakarta)

PENUTUPAN LAHAN PERIODE TAHUN 1990 S/D 2019

Penafsiran Penutupan Lahan seluruh DAS Ciliwung (APL dan Kawasan Hutan)

Penutupan Lahan	1990	1996	2000	2003	2006	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hutan Lahan Kering Primer	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	416	414	414	414	414
Hutan Lahan Kering Sekunder	2.347	2.347	2.347	2.347	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.548	1.075	2.700	2.703	2.637	2.637
Hutan Tanaman	2.915	2.915	2.915	2.915	3.694	4.133	4.181	4.181	4.181	4.193	3.793	2.170	2.167	6.384	6.384
Belukar	10.384	10.384	110	110	110	110	41	41	30	24	30	82	82	82	82
Perkebunan	543	543	543	543	543	543	543	543	543	609	905	1.032	1.032	1.074	1.066
Pemukiman	1.598	1.614	12.610	21.074	21.914	24.036	24.707	24.707	24.666	25.032	25.138	25.400	25.789	25.877	25.877
Tanah Terbuka	134	134	112	20	20	20	20	20	20	-	-	-	12	-	11
Badan Air	345	345	73	73	73	73	82	82	82	108	109	97	123	115	115
Belukar Rawa	156	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian Lahan Kering	16.389	16.373	16.364	7.992	7.776	7.405	9.615	9.615	9.615	7.968	7.951	7.537	7.149	2.854	2.851
Pertanian Lahan Kering Campur	6.255	6.255	6.255	6.255	5.558	3.368	522	522	563	269	788	794	819	848	848
Sawah	382	382	95	95	184	184	161	161	161	1.669	1.669	1.693	1.578	1.586	1.586
Pelabuhan	187	187	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	207	207
Tidak Teridentifikasi*	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66
Total Luas	42.144														

Pemukiman merupakan tutupan dengan laju peningkatan yang signifikan.

PENUTUPAN LAHAN PERIODE TAHUN 1990 S/D 2019

Penafsiran Penutupan Lahan pada Kawasan Hutan DAS Ciliwung

Penutupan Lahan	1990	1996	2000	2003	2006	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hutan Lahan Kering Primer	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	414	414	414	414
Hutan Lahan Kering Sekunder	1.853	1.853	1.853	1.853	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	2.370	2.373	2.370	2.370
Hutan Tanaman	1.425	1.425	1.425	1.425	2.207	2.308	2.351	2.351	2.351	2.356	2.346	1.048	1.045	1.119	1.119
Belukar	64	64	64	64	64	64	21	21	21	14	14	14	79	79	79
Perkebunan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	19	22	22	36	36
Tanah Terbuka	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	1	1	-	-	-
Pertanian Lahan Kering	107	107	107	107	108	109	109	109	109	224	224	221	142	44	44
Pertanian Lahan Kering Campur	218	218	218	218	218	116	116	116	116	-	-	0	14	27	27
Total Luas	4.090														

Tutupan lahan kawasan hutan pada DAS Ciliwung didominasi hutan.

tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya relokasi perumahan warga yang terdapat di sisi kiri kanan sungai. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) untuk segera merencanakan realokasi pemukiman warga dimaksud, yang mana di dalamnya terdapat rencana lokasi pemukiman yang aman bagi warga pemukiman dari ancaman atas dampak dari bencana banjir dan longsor yang terjadi di hulu sungai.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyediakan bibit tanaman dengan jenis yang dapat menyerap air dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat (seperti jenis bambu petung), dalam rangka melaksanakan rehabilitasi lahan di Sub DAS Cisampay yang termasuk dalam areal kerja PTPN VIII, termasuk lokasi ex pemukiman warga yang terdampak banjir dan longsor di Wilayah Gunung Mas.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku wali data, untuk menyajikan data Lahan Kritis yang terdapat di Areal Kerja PTPN VIII serta Areal Kerja Perusahaan Perkebunan Milik Negara (BUMN) lainnya, sebagai target program reboisasi dan serta kegiatan rehabilitasi hutan.
4. Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh perusahaan perkebunan milik negara (BUMN), yaitu PTPN I-XIV, untuk berkomitmen melakukan kegiatan reboisasi serta mendukung kegiatan rehabilitasi hutan di areal kerja masing-masing, dalam rangka percepatan target pelaksanaan program peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pelestarian hutan di Indonesia.

5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk mendorong pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan di masing-masing areal kerja PT Perkebunan Nusantara.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghadirkan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VIII dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021, untuk menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 30 Januari 2020

Ketua Tim,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi, S.H.

A-294

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31552/t/Komisi+IV+Dorong+Pemerintah+Reboisasi+Area+Hutan+Gunung+Mas>

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/16215931/banjir-bandang-di-bogor-komisi-iv-minta-220-rumah-di-gunung-mas-direlokasi>

<https://bogor.kompas.com/read/2021/01/28/16215931/banjir-bandang-di-bogor-komisi-iv-minta-220-rumah-di-gunung-mas-direlokasi>

<https://kilas.maiwanews.com/komisi-iv-dorong-pemerintah-reboisasi-area-hutan-gunung-mas-49304.html>

<https://newskabarnegeri.com/2021/01/29/komisi-iv-dorong-pemerintah-reboisasi-area-hutan-gunung-mas/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011343894/soroti-longsor-gunung-mas-komisi-iv-dpr-akan-temui-menteri-lhk-dan-ptpn>